



RENCANA KERJA

DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025



**DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGKA
2024**



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA

- Menimbang
- a. bahwa penyusunan rencana kerja perangkat daerah dilakukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui penyusunan perencanaan pembangunan yang selaras dengan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah daerah;
 - b. bahwa rencana kerja perangkat daerah merupakan panduan dan arahan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah pada tahun yang berkenaan;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 perlu tetap kandengan Peraturan Bupati Bangka;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pengarus utamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);
20. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);
21. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24);
22. Peraturan Bupati Bangka Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang disusun secara teknokratis.
7. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPD dan mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Rencana Kerjasama Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Strategi adalah langkah berisikan program-program pembangunan sebagai prioritas Pembangunan Daerah / Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*).
16. Penganggaran berbasis program adalah konsep pendekatan penganggaran yang lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, yang mendukung prioritas nasional dan provinsi, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

BAB II

JANGKA WAKTU RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan pendekatan holistik tematik, integratif dan spasial serta mengacu prinsip Penganggaran berbasis program, berbasis hasil evaluasi capaian kinerja terhadap tujuan, sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan RKPD Tahun 2025 serta mendukung pencapaian Tujuan RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.
- (2) Rincian Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MATERI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Pasal 5

Renja Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator, target, lokasi pelaksanaan kegiatan, pagu anggaran yang dibutuhkan serta sumber pendanaannya baik berasal dari APBD, APBD Provinsi, APBN maupun dari sumber-sumber lainnya.

BAB V

PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Pasal 6

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan RKA Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perangkat Daerah membuat Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah secara triwulanan atas pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah yang berisi uraian tentang realisasi kinerja dan keuangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bappeda paling lambat 5 (lima) hari setelah berakhirnya triwulan tersebut.

- (3) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah.
- (4) Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah menjadi masukan dan bahan pertimbangan analisis serta evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 31 Juli 2024
Pj. BUPATI BANGKA,

dto

M. HARIS AR *

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 31 Juli 2024
Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

dto

ASMAWI ALIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024 NOMOR 20

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA ^GIAN HUKUM DAN HAM,


SRI ELLV SAFITRI, SH
PEMBINA TK. I/IVb
NIP. 197410082005012007

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tahun 2025 ini dapat terselesaikan. Rencana Kerja (Renja) 2025 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Bangka sehingga dapat menjadi data dasar dalam upaya pengembangan Sub Sektor Perikanan Kabupaten Bangka. Data yang benar, akurat, relevan, mutakhir dan tepat waktu sangat dibutuhkan dalam menyusun perencanaan dan mengevaluasi kegiatan pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan.

Rencana Kerja (Renja) 2025 Dinas Perikanan Kab. Bangka merupakan penjabaran dari Renstra yang selanjutnya akan memberikan gambaran dalam bentuk Profil Perikanan Kabupaten Bangka Tahun 2025 yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Perikanan Kabupaten Bangka yang didukung dengan program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2025 dan aspek perikanan lainnya dalam satu tahun anggaran.

Dokumen ini diharapkan mampu menjawab isu-isu strategis dan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, dan target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Dinas Perikanan Kab. Bangka sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Akhirnya atas segala partisipasi dan koordinasi dari berbagai pihak dalam usaha bersama dalam menyajikan data yang baik, lengkap, mutakhir dan tepat waktu sehingga dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya guna mewujudkan Pembangunan Perikanan di Kabupaten Bangka dan perkembangan ekonomi Kabupaten Bangka pada umumnya.

Sungailiat, 30 Juli 2024

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Bangka,



Drs. Arman
Pembina Utama Muda
NIP. 19681028 199601 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	27
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	30
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	34
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	66
BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	68
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	71
3.3. Program dan Kegiatan	72
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	81
BAB V PENUTUP	
5.1 Catatan Penting yang Perlu Diperhatikan	99
5.2 Kaidah Pelaksanaan.....	99
5.3 Rencana Tindak Lanjut	100
LAMPIRAN	101

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Keterkaitan Renja Dinas Perikanan dengan Dokumen RKPD dan Rencana Strategis Dinas Perikanan adalah sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif serta melaksanakan konsep pendekatan penganggaran yang mengacu pada tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas pembangunan daerah, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Tipe A Kabupaten Bangka, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Perikanan dan Tugas Pembantuan yang diberikan/didelegasikan kepada Daerah.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Dinas Perikanan Kabupaten Bangka sebagai salah satu unsur penunjang dalam pelaksanaan tugas pemerintahan Daerah.

Untuk menunjang penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah yang berdayaguna dan berhasil guna perlu disusun perencanaan pembangunan daerah yang salah satunya adalah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Sebagai upaya mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan dan meningkatkan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi dengan sasaran meningkatnya produksi barang dan jasa dan meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi sesuai urusan yang ditangani dalam pencapaian indikator kinerja dan sasaran Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tahun 2025 didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
23. Peraturan Bupati Bangka Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Tipe A Kabupaten Bangka;
24. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);
25. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24);
26. Peraturan Bupati Bangka Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 15);
27. Salinan Peraturan Bupati Bangka Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 16);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tahun 2025 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2025 dan perencanaan program/kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tahun 2025.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tahun 2025 ini adalah sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan

Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 Lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Bangka.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sistematika penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Bangka adalah penjabaran perencanaan tahunan dan memanfaatkan data kinerja Rencana Strategis pada tahun yang bersangkutan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan, program dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perikanan selama Tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2025. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan penetapan indikator kinerja, yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.

Pada tahun 2023 Anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Bangka sebesar Rp. 8.417.326.111,00 yaitu untuk pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Pilihan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan dengan 3 (tiga) program dan 13 (tiga belas) kegiatan serta 26 (dua puluh enam) sub kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi keuangan sebesar Rp. 7.564.297.915,00 dengan capaian kinerja fisik sebesar 98,04% dan capaian kinerja keuangan sebesar 89,87%.

Adapun evaluasi pelaksanaan renja tahun 2023 dan capaian renstra Dinas Perikanan dapat dilihat pada tabel T-C.29 dibawah ini.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Bangka

Perangkat Daerah : Dinas Perikanan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3.25	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN									
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
		Nilai Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah (%)	28,15	28,05	24,15	24,15	1	28,15	80,35	2,86
		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	10,70	10,69	12,5	12,5	1	10,70	33,90	3,17
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI (%)	0	0	0	0	0	0	0	0
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	72,10	72,00	72,00	72	72,00	72,10	216,20	2,99
		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4,00	0	3,88	3,88	1	4,00	11,88	2,97

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Persentase BMD Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik	60,45	60,15	80,13	80,13	1	60,45	201,03	3,33
3.25.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang Disusun Sesuai Standar (%)	100	100	100	100	1	100	300	3
		Persentase Pelaporan Kinerja yang Disusun Sesuai Standar (%)	100	100	100	100	1	100	300	3
3.25.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	12	6	6	1	8	26	3,25
3.25.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kinerja SKPD (Laporan)	4	0	4	4	1	4	8	2
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		0	8	8	1	0	8	
3.25.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Sesuai Standar (%)	100	100	100	100	1	100	300	3
3.25.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	37	12	37	37	1	37	86	2,4

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.25.01.2.02.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	0	12	12	1	12	24	2
3.25.01.2.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD (Laporan)	42	42	0	0	0	42	42	1
3.25.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap (%)	100	100	100	100	1	100	300	3
		Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian (%)	100	100	100	100	1	100	300	3
		Persentase Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (%)	10,81	0	10,81	10,81	1	10,81	21,62	2
3.25.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	16	16	16	16	1	37	37	2,3
3.25.01.2.05.0003	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	33	11	11	1	12	56	1,70
3.25.01.2.05.0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (oramg)	4	0	0	0	0	4	4	1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.25.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum di Perangkat Daerah	100	100	100	100	1	100	300	3
3.25.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	36	12	12	12	1	12	36	3
3.25.01.2.06.0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	36	0	12	12	1	12	24	0,67
3.25.01.2.06.0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	36	0	12	12	1	12	24	0,67
3.25.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penambahan aset perangkat daerah	71,86	71,86	80,13	80,13	1	71,86	223,85	3,12
3.25.01.2.07.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional yang Disediakan (Unit)	2	0	0	0	0	0	0	0
3.25.01.2.07.0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	62	0	1	1	1	62	63	1,02
3.25.01.2.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	0	0	0	0	5	5	1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.25.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Arsip Perangkat Daerah Yang Dikelola Sesuai Peraturan (%)	81,78	81,78	64,25	64,25	1	81,78	227,81	2,79
3.25.01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	1	1	1	1	3	3
3.25.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	1	1	1	1	3	3
3.25.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Layanan Kebersihan kantor Yang Tertangani (bulan)	1	1	1	1	1	1	3	3
3.25.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara (%)	80,00	80,00	80,13	80,13	1	80,00	240,13	3,01
3.25.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	26	24	25	25	1	27	76	50,1
3.25.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	38	38	38	38	1	38	114	3
3.25.01.2.09.0007	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (unit)	1	0	0	0	0	1	1	1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.25.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	5	3	3	1	1	9	9
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP									
		Persentase Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap yang diadakan (%)	24,00	24,00	24,00	24,00	1	24,00	72,00	3,00
		Persentase Nelayan yang Dilayani (%)	82,12	81,33	90,00	90,00	1	82,12	254,24	3,47
		Persentase Persentase Pelaku Perikanan Tangkap yang Terlatih (%)	1,20	1,20	0	0	0	1,20	2,40	2,00
3.25.03.02.01	Kegiatan Pengelolaan Penangkapana Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat di Usahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Nelayan/ KUB yang Mendapatkan Bantuan Prasarana Perikanan Tangkap (%)	2,55	2,55	2,55	2,55	1	2,55	7,65	3
		Persentase Nelayan/ KUB yang Mendapatkan Bantuan Sarana Perikanan Tangkap (%)	21,45	21,45	24,00	24,00	1	21,45	66,90	3,12
		Data Valid Perikanan Tangkap (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	3	3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.25.03.02.01.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	3	3
3.25.03.02.01.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	1	0	0	0	0	1	1	1
3.25.03.02.01.0003	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)	2	45	0	0	0	2	47	23,5
3.25.03.02.02	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Nelayan/ KUB yang Mendapatkan Bantuan Pendanaan/ Pembiayaan, Kemitraan Usaha (%)	0,03	0	0	0	0	0,03	0,03	1
		Persentase Nelayan yang Memiliki Sertifikat Pelatihan (%)	1,20	0	0	0	0	1,20	1,20	1
		Persentase KUB yang Terbentuk (%)	0,77	0,77	0,77	0,77	1	0,77	2,31	3
		'Persentase KUB yang Dibina (%)	100	100	0	0	0	100	100	1
3.25.03.02.02.0001	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (orang)	50	45	45	45	1	50	140	2,8
3.25.03.02.02.0002	Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	3	5	3	3	1	3	11	3,67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.25.03.02.02.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Unit Usaha)	5	0	0	0	0	5	5	1
3.25.03.02.03	Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase Pelaku Usaha Perikanan Tangkap yang Terlayani (%)	100	100	100	100	1	100	300	3
3.25.03.02.03.0001	Sub Kegiatan Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (Dokumen)	1	0	0	0	0	1	1	1
3.25.03.02.03.0002	Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Operasional Kantor UPTD TPI Sungailiat (bulan)	12	12	12	12	1	12	36	3
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA									
		Persentase Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya yang diadakan (%)	9,62	9,62	9,62	9,62	1	9,62	28,86	3
		Persentase Pembudidaya yang Dilayani (%)	82,12	80,00	90,00	90,00	1	82,12	252,12	3,08
		Persentase Pelaku Perikanan Budidaya yang Terlatih (%)	25,42	23,60	0	0	0	25,42	49,02	1,93
3.25.04.2.01	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam	Persentase Pembudidayaan Ikan yang Memiliki Izin Usaha Budidaya Perikanan (%)	19,23	0	0	0	0	19,23	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
3.25.04.2.01.0002	Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan (Rekomendasi)	3	1	5	5	1	3	9	3
3.25.04.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase Pembudidaya Ikan yang Memiliki Sertifikat Pelatihan (%)	16,95	0	16,95	16,95	0	16,95	33,90	2
3.25.04.2.02.0001	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (kelompok)	1	0	0	0	0	1	1	1
3.25.04.2.02.0004	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	5	0	5	5	1	5	10	2

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.25.04.2.03	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Persentase Pembudidayaan Ikan yang Memiliki Tanda Daftar Pencatatan Pembudidayaan Ikan Kecil (%)	0,96	0	0	0	0	0,96	0,96	1
3.25.04.2.03.0002	Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Daya Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Rekomendasi)	5	0	0	0	0	5	5	1
3.25.04.2.04	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Pembudidaya Ikan yang Mendapatkan Bantuan Prasarana Perikanan Budidaya (%)	6,78	0	9,62	9,62	1	6,78	16,4	2,42
		Persentase Pembudidaya Ikan yang Mendapatkan Bantuan Sarana Perikanan Budidaya (%)	2,84	0	2,84	2,84	1	2,84	8,52	3
		Data Valid Perikanan Budidaya (Dokumen)	4	1	0	0	0	4	5	1,25
		Persentase Pembudidaya Ikan yang Memiliki Sertifikat Pelatihan Pemanfaatan Air (%)	8,47	0	0	0	0	8,47	8,47	1
3.25.04.2.04.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	3	1	0	0	0	3	4	1,33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.25.04.2.04.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	7	12	2	2	1	7	21	3
3.25.04.2.04.0003	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	2	0	0	0	0	2	2	1
3.25.04.2.04.0004	Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	1	1	0	0	0	1	2	2
3.25.04.2.04.0005	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Orang)	80	80	80	80	1	80	240	3
3.25.04.2.04.0006	Sub Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang direncanakan, dikembangkan, dimanfaatkan dan dilindungi (Ha)	1	0	0	0	0	1	1	1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.25.04.2.04.0007	Sub Kegiatan Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat (Orang)	5	0	0	0	0	5	5	1
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN									
		Persentase Usaha Perikanan Tangkap yang Diawasi	100	0	0	0	0	0	100	1
		Persentase Usaha Perikanan bidang Pembudidayaan ikan yang Diawasi	100	0	0	0	0	0	100	1
3.25.05.2.01	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha Perikanan Tangkap yang Taat Aturan (%)	100	0	0	0	0	0	100	1
3.25.05.2.0001	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1	0	0	0	0	1	1	1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.25.05.2.0002	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1	0	0	0	0	1	1	1
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN									
		Persentase Sarana dan Prasarana Produksi Olahan Hasil Perikanan yang diadakan (%)	100	0	0	0	0	100	100	1
		Persentase Pelayanan Terhadap Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (%)	100	0	0	0	0	100	100	1
		Persentase Pelaku Usaha/Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan yang Terlatih (%)	100	0	0	0	0	100	100	1
3.25.06.2.01	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Persentase Pengolahan Pemasar Hasil Perikanan yang Memiliki Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (%)	2	0	0	0	0	2	2	1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.25.06.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko (Dokumen)	1	0	0	0	0	2	2	1
3.25.06.2.02	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Pengolah dan Pemasar yang Telah Mengikuti Pelatihan (%)	0,05	0	0	0	0	2	2	1
3.25.06.2.02.0001	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	1	0	0	0	0	2	2	1
3.25.06.2.03	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase POKLAHSAR yang Mendapatkan Bantuan (%)	5	0	0	0	0	2	2	1
3.25.06.2.03.0001	Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	0	0	0	0	2	2	1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Kabupaten/Kota	(Ton)								
3.25.06.2.03.0002	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	2	0	0	0	0	2	2	1

Selanjutnya berdasarkan pengukuran kinerja atas indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tahun 2024 – 2026 dan diperjanjikan secara tahunan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, capaian Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut ini.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2023
1.	Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	1,37
2.	Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	5,22
1.	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	24.750,608
2.	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	2.142,547
3.	Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	Ton	1.306
4.	Hasil Evaluasi AKIP	Kategori/Nilai	BB (73,60)

Dalam pencapaian indikator ini menunjukkan bahwa peran Dinas Perikanan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam capaian tersebut sudah berpedoman dan sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.

Pencapaian sasaran meningkatnya produksi Perikanan dan meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi Dinas Perikanan perlu didukung oleh anggaran dengan mendasari pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan anggaran daerah;
2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;

4. Sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. APBD Dinas Perikanan merupakan dasar bagi Dinas Perikanan untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut juga dinilai dari cakupan keseluruhan dalam proses penyusunan perencanaan Dinas Perikanan pada tahun 2023 yang telah menghasilkan dokumen Perencanaan Dinas Perikanan diantaranya :

- a. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA).
 - b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
 - c. Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) , Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD), dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
 - e. Penjabaran APBD dan DPA-SKPD.
- **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya tercermin pada penyerapan atas penggunaan anggaran yang telah disediakan dalam mendukung sasaran “Meningkatnya Produksi Perikanan dan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Dinas Perikanan”, dapat dilihat sebagai berikut :

Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Dana (Rp)	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran (Rp)
		Keuangan (Rp)	Fisik (%)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	5.309.257.196,00	5.015.537.835,00	100	293.719.361,00
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	91.145.950,00	88.306.736,00	100	2.839.214,00
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	59.929.500,00	58.776.121,00	100	1.153.379,00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.273.450,00	16.779.385,00	100	1.494.065,00
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.943.000,00	12.751.230,00	100	191.770,00
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.651.027.048,00	3.420.672.580,00	100	230.354.468,00
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.634.177.048,00	3.403.964.220,00	98,69	230.212.828,00
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16.850.000,00	16.708.360,00	100	141.640,00
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.750.000,00	14.702.750,00	100	47.250,00
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	9.750.000,00	9.750.000,00	100	0
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.000.000,00	4.952.750,00	100	47.250,00
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	287.375.200,00	279.268.599,00	100	8.106.601,00
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	263.930.200,00	261.346.999,00	100	2.583.201,00
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.995.000,00	4.995.000,00	100	0
Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	18.450.000,00	12.926.600,00	100	5.523.400,00
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.807.330,00	6.450.000,00	100	357.330,00
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	6.807.330,00	6.450.000,00	100	357.330,00
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0	0
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.080.071.668,00	1.039.795.823,00	100	40.275.845,00
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	893.754.620,00	879.261.181,00	100	14.493.439,00

Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Dana (Rp)	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran (Rp)
		Keuangan (Rp)	Fisik (%)	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91.895.033,00	68.100.700,00	100	23.794.333,00
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	94.422.015,00	92.433.942,00	100	1.988.073,00
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	178.080.000,00	166.341.347,00	74,55	11.738.653,00
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	139.030.000,00	137.322.197,00	100	1.707.803,00
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.050.000,00	29.019.150,00	74,55	10.030.850,00
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0	0
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.892.352.720,00	1.470.219.274,00	99,92	422.133.446,00
Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	23.870.000,00	22.561.280,00	100	1.308.720,00
Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	23.870.000,00	22.561.280,00	100	1.308.720,00
Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1.737.084.000,00	1.320.328.616,00	99,92	416.755.384,00
Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	1.681.864.000,00	1.267.136.916,00	99,92	414.727.084,00
Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	55.220.000,00	53.191.700,00	60,04	2.028.300
Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	131.398.720,00	127.329.378,00	100	4.069.342,00
Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	131.398.720,00	127.329.378,00	100	4.069.342,00
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.215.716.195,00	1.078.540.806,00	100	137.175.389,00
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.768.800,00	9.048.000,00	100	720.800,00

Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Dana (Rp)	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran (Rp)
		Keuangan (Rp)	Fisik (%)	
Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang menggunakan Teknologi sederhana, Semi Insentif, dan insentif, serta tidak menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	9.768.800,00	9.048.000,00	96,56	720.800,00
Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	166.427.534,00	145.915.008,00	100	20.512.526,00
Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	166.427.534,00	145.915.008,00	100	20.512.526,00
Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.039.519.861,00	923.577.798,00	99,96	115.942.063,00
Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	985.279.861,00	884.417.798,00	99,93	100.862.063,00
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	54.240.000,00	39.160.000,00	100	15.080.000,00
	8.417.326.111,00	7.564.297.915,00	98,04	853.028.196,00

Berdasarkan sumber anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian sasaran “*meningkatkan produksi Perikanan dan meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi dinas perikanan*” sebesar Rp. 8.417.326.111,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.564.297.915,00 atau 89,87% dari anggaran yang tersedia, hal ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran telah digunakan secara optimal sehingga terdapat sisa sebesar Rp. 853.028.196,00.

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa Belanja Aparatur terdiri dari 1 program, 7 kegiatan dan 18 sub kegiatan dengan total pagu anggaran Rp. 5.309.257.196,00 dengan realisasi fisik 96,35 % dan keuangan sebesar Rp. 5.015.537.835,00 atau 94,47 %.

Disamping itu, Belanja Publik terdiri dari 2 program, 6 kegiatan dan 8 sub kegiatan dengan total pagu anggaran Rp. 3.053.828,00,- dengan realisasi fisik 94,56 % dan keuangan sebesar Rp. 2.509.600,00,- atau 82,18 %.

Semua bantuan tersebut di atas telah diserahkan kepada koperasi penerima dan sudah dimanfaatkan oleh penerima dengan baik.

Secara garis besar pelaksanaan kegiatan tahun 2023 berjalan dengan baik, akan tetapi terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan baik secara teknis maupun keuangan(rasionalisasi anggaran).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/ target rencana kerja periode sebelumnya yakni sampai dengan Tahun 2023 dapat disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan
Kabupaten Bangka

No	Indikator	IKK	Kesesuaian		Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			A d a	Tidak Ada	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1.	Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (%)	Jumlah total produksi perikanan tangkap	√		1,55	2	-	-	1,37	-	-	-	
2.	Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya(%)	Jumlah total produksi perikanan budidaya	√		2,80	-	-	-	5,22	-	-	-	
3.	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Jumlah total produksi perikanan tangkap	√		-	28.555,24	29.055,24	29.555,24	24.750,608	28.555,24	29.055,24	29.555,24	
4.	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya(Ton)	Jumlah total produksi perikanan budidaya	√		-	2.721,81	2.733,81	2.745,81	2.142.547	2.721,81	2.733,81	2.745,81	
5.	Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (Ton)		√		-	800,00	824,00	848,00	1.306	800,00	824,00	848,00	
6.	Hasil Evaluasi AKIPD Dinas Perikanan	Hasil Evaluasi AKIP		√	BB (79,00)	BB (78,70)	BB (78,80)	BB (79,00)	BB (73,60)	BB (78,70)	BB (78,80)	BB (79,00)	

Berdasarkan tabel di atas terlihat kinerja pelayanan yang telah dilakukan Dinas Perikanan Kabupaten Bangka pada tahun 2023 mencapai hasil baik. Secara garis besar pelaksanaan kegiatan tahun 2023 juga berjalan dengan baik, akan tetapi terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan baik secara teknis maupun keuangan (rasionalisasi anggaran).

Pada tahun 2023 produksi perikanan budidaya melebihi target , capaian produksi yaitu sebesar 2,75 % dan realisasi sebesar 5,22 % sehingga persentase capaian sebesar 186,43%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2022 capaian produksi perikanan budidaya sebanyak 2.709,812 ton sedangkan pada tahun 2023 produksi perikanan budidaya sebanyak 2.142,547 ton. Produksi Perikanan Budidaya mengalami penurunan dikarenakan

- Tidak ada anggaran biaya khusus untuk sub kegiatan dalam pengambilan/pengumpulan data produksi perikanan budidaya terutama untuk pengambilan data statistik ke perusahaan tambak udang.
- Tambak udang milik perusahaan banyak yang tidak beroperasi dikarenakan banyak terserang virus dan penyakit sehingga mengalami kematian massal.
- Akibat musim kemarau yang berkepanjangan sehingga sumber air mengalami kekeringan serta penyakit dan virus berpengaruh terhadap penurunan produksi perikanan budidaya.
- Tidak adanya penambahan luas lahan pembudidayaan air tawar dan juga pemanfaatan lahan yang sudah tercetak hanya 30% yang mengakibatkan hasil produksi tidak maksimal.
- Banyaknya pelaku usaha perikanan air tawar yang beralih ke profesi tambang.
- Pembudidaya air tawar bukan merupakan mata pencaharian utama, hanya sekedar hobi/sampingan bagi para pembudidaya.
- Harga pakan udang dan ikan terus mengalami kenaikan.

Pada tahun-tahun selanjutnya, agar capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Bangka dapat tercapai sesuai target yang diharapkan, maka Dinas Perikanan Kabupaten Bangka terus berupaya mengatasi berbagai kendala atau masalah yang dihadapi diantaranya dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Melakukan pembinaan yang lebih intensif terkait teknis maupun administratif kepada kelompok (KUB/Pokdakan/UPR) agar dapat meningkatkan produksi Perikanan sehingga dapat meningkatkan pendapatan (kesejahteraan).
- b. Melakukan koordinasi kepada instansi terkait (Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan KKP-RI) dalam meningkatkan keterampilan masyarakat Perikanan di Kabupaten Bangka.

- c. Melakukan koordinasi kepada Satker PSDKP dan Dinas Provinsi Perikanan terkait penanganan IUU (*Illegal, Unreported, Unregulated Fishing*).
- d. Melakukan identifikasi sasaran program dan kegiatan serta penyusunan kegiatan yang memperhitungkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perikanan kabupaten Bangka serta melakukan peningkatan kualitas Aparatur Dinas Perikanan kabupaten Bangka.
- e. Mengupayakan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas bagi aparatur Dinas Perikanan kabupaten Bangka.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

1. Tingkat Pelayanan Dinas Perikanan

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan TIPE A Kabupaten Bangka, Dinas Perikanan merupakan Urusan Penunjang Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang perikanan. Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan/didelegasikan kepala Daerah.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Dinas Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolah dan pemasaran hasil perikanan serta pengawasan sumber daya perikanan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolah dan pemasaran hasil perikanan serta pengawasan sumber daya perikanan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolah dan pemasaran hasil perikanan serta pengawasan sumber daya perikanan;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. Pembinaan UPT;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Permasalahan dan Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan. Secara struktur organisasi, saat ini Dinas Perikanan telah mencapai bentuk yang optimal dalam arti cakupan bidang tugas dan fungsinya telah memenuhi

kriteria organisasi yang disyaratkan. Keberadaan Sekretariat dan empat bidang (Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, dan Bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan) telah sesuai dan dapat mendukung fungsi-fungsi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dan penyediaan data, walaupun membawa konsekuensi luas dalam aspek SDM dan fasilitas.

Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bidang harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tupoksi masing-masing dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Kedepan, pengembangan Dinas Perikanan ditekankan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki. Peningkatan kapasitas ditujukan untuk memenuhi perbedaan antara kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana di lembaga. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Adanya pendangkalan muara sungai jelitik alur keluar masuk PPN Sungailiat;
2. Adanya kegiatan penangkapan ikan dan penambangan di laut;
3. Keterbatasan sarana tambat labuh nelayan karena lokasi berada pada kawasan hutan lindung, hutan produksi dan hutan konservasi;
4. Keterbatasan kemampuan penyediaan sarana dan prasarana operasional penangkapan ikan;
5. Potensi lahan budidaya air payau (hutan mangrove) sebagian besar berada lokasi kawasan hutan lindung dan hutan produksi;
6. Adanya pencemaran pada perairan yang disebabkan oleh aktifitas penambangan;
7. Terbatasnya akses permodalan dalam pengembangan usaha perikanan;
8. Terbatasnya SDM/ Aparatur yang profesional di bidang perikanan;
9. Tingginya biaya produksi (pakan dan obat-obatan) mengakibatkan daya saing rendah;
10. Terbatasnya akses pasar ke luar pulau guna menjual hasil produksi perikanan baik berupa segar maupun olahan produk
11. Rendahnya kesadaran dan kemampuan nelayan dalam menerima perubahan;

12. Menjalin dan meningkatkan kerjasama dengan pihak lain terkait usaha perikanan Tangkap;
13. Meningkatkan pelatihan kepada nelayan agar kompetensi meningkat;
14. Terbatasnya kendaraan operasional dalam melakukan kegiatan pembinaan maupun pengawasan bidang Perikanan
15. Tingginya kematian ikan baik yang disebabkan oleh penyakit ikan maupun karena cuaca ekstrim;
16. Kurangnya pembudidaya ikan dalam akses ilmu pengetahuan dan teknologi perikanan budidaya serta masih kurangnya kemampuan dibidang Perikanan Budidaya;
17. Tidak tersedianya sarana dan prasarana untuk pengawasan perikanan tangkap dan budidaya di Perairan Darat;
18. Keterbatasan SDM untuk mendukung kegiatan Pengawasan;
19. Kondisi tambatan perahu dan pendukung lainnya untuk perikanan tangkap di Perairan Darat yang tidak memadai.

3. Dampak Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Pembangunan Daerah Terhadap Capaian Program Nasional/Internasional.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah terhadap capaian program Nasional/Internasional yang berorientasi pada Sustainable Development Goals atau SDGs, Dinas Perikanan masuk ke dalam tujuan yang ke 12 yaitu Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, dimana tujuan ke-12 dari program ini adalah konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab atau responsible consumption and production. Tujuan ini memastikan pola konsumsi dan produksi yang dilakukan menggunakan cara-cara yang berkelanjutan.

Pola konsumsi ikan yang baik bagi masyarakat mempunyai pengaruh penting dalam mencegah stunting. Jenis ikan lokal yang dapat menjadi rujukan konsumsi anak untuk pencegahan stunting adalah ikan patin, lele, mas, Akan tetapi konsumsi ikan tidak hanya dalam kondisi segar namun juga melalui bentuk olahan yang dapat meningkatkan nilai tambah.

Momentum Hari Ikan Nasional (HARKANAS) yang selalu dapat menjadi pendorong meningkatnya kontribusi bidang perikanan terhadap penurunan prevalensi stunting melalui Kampanye Gerakan Makan Ikan hingga desa / kelurahan.

4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan

Dalam usaha pencapaian tantangan dan peluang pembangunan yang dihadapi oleh Dinas Perikanan adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
- Meningkatkan sarana dan prasarana yang representatif untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan Perikanan sehingga dapat meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan dengan baik;
- Tersedianya sarana dan prasarana teknologi yang memadai;
- Tersedianya peraturan yang mendukung kegiatan perencanaan dan evaluasi;
- Adanya diklat, seminar, bimtek workshop dalam rangka peningkatan kualitas SDM yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, perguruan tinggi dan konsultan/ swasta;
- Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) di lingkungan pemerintahan maupun antara pemerintah dengan masyarakat sehingga dapat mendukung pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah.

5. Dalam upaya pencapaian target dan sasaran strategis upaya yang harus ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2025 adalah

- a. Setiap bidang disarankan untuk menyusun program dan kegiatan yang akan di laksanakan dengan cermat yang mengacu pada RPD Kab. Bangka dan RENSTRA Dinas Perikanan Tahun 2024-2026.
- b. Akan tetap mengusulkan kembali kegiatan yang tidak terlaksana pada anggaran 2023 dan mengevaluasi kembali program serta kegiatan yang akan di usulkan.
- c. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitra usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan kepada para Nelayan, Kelompok Pembudidaya Ikan serta para pelaku usaha pengolah dan pemasar.
- d. Meningkatkan Produksi Perikanan dengan cara peningkatan sarana dan prasarana Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolah dan Pemasar serta Pengawasan Sumber Daya Perikanan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode 1 tahun, yang memuat daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan seluruh OPD dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPD, menjadi pedoman penyusunan RENJA OPD serta menjadi acuan proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Rencana Kerja (Renja) RKPD Kabupaten Bangka tahun 2025 telah disusun pada Bulan Desember 2023. Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rencana kerja tersebut untuk mengakomodir kebutuhan OPD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD. Dalam Rencana Kerja RKPD terdapat 5 program yang dicantumkan dalam RENJA Dinas Perikanan Kabupaten Bangka yaitu:

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
3. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 2025 DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGKA

RANCANGAN AWAL RKPD (MATRIKS RKPD)						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	CATATAN PENTING
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN					

		PERSENTASE KONTRIBUSI PDRB SUB SEKTOR PERIKANAN		7,96	7.220.000.000		PERSENTASE KONTRIBUSI PDRB SUB SEKTOR PERIKANAN		7,96	2.704.250.000	
		JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP (TON)		28.923,84	4.480.000.000		JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP (TON)		28.923,84	1.399.250.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				4.480.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				1.399.250.000	
		Persentase Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap yang diadakan (%)		24,00	1.350.000.000		Persentase Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap yang diadakan (%)		24,00	624.250.000	
		Persentase Nelayan yang Dilayani (%)		82,50	1.455.000.000		Persentase Nelayan yang Dilayani (%)		82,50	375.000.000	

		Persentase Pelaku Perikanan Tangkap yang Terlatih (%)		1,20	1.675.000.000		Persentase Pelaku Perikanan Tangkap yang Terlatih (%)		1,20	400.000.000	
	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Data Valid Perikanan Tangkap (Dokumen)		1	45.000.000	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Data Valid Perikanan Tangkap (Dokumen)		1	40.000.000	
		Persentase Nelayan/ KUB yang Mendapatkan Bantuan Prasarana Perikanan Tangkap (%)		2,55	800.000.000		Persentase Nelayan/ KUB yang Mendapatkan Bantuan Prasarana Perikanan Tangkap (%)		2,55	399.250.000	
		Persentase Nelayan/ KUB yang Mendapatkan Bantuan Sarana Perikanan Tangkap (%)		21,45	550.000.000		Persentase Nelayan/ KUB yang Mendapatkan Bantuan Sarana Perikanan Tangkap (%)		21,45	225.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)		1	45.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)		1	40.000.000	

	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)		25	800.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)		1	399.250.000	
	Sub Kegiatan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)		25	550.000.000	Sub Kegiatan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)		2	225.000.000	
	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Nelayan yang Memiliki Sertifikat Pelatihan (%)		1,20	1.600.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Nelayan yang Memiliki Sertifikat Pelatihan (%)		1,20	325.000.000	
		Persentase KUB yang Terbentuk (%)		0,77	75.000.000		Persentase KUB yang Terbentuk (%)		0,77	75.000.000	
		Persentase KUB yang Dibina (%)		100	0		Persentase KUB yang Dibina (%)		100	0	
		Persentase Nelayan/ KUB yang Mendapatkan Bantuan Pendanaan/ Pembiayaan, Kemitraan Usaha (%)		0,03	1.200.000.000		Persentase Nelayan/ KUB yang Mendapatkan Bantuan Pendanaan/ Pembiayaan, Kemitraan Usaha (%)		0,03	125.000.000	

	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (orang)		50	1.600.000.000	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (orang)		50	325.000.000	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)		3	75.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)		3	75.000.000	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Unit Usaha)		5	1.200.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Unit Usaha)		5	125.000.000	
	Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase Pelaku Usaha Perikanan Tangkap yang Terlayani (%)			130.000.000	Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase Pelaku Usaha Perikanan Tangkap yang Terlayani (%)		100	130.000.000	

	Sub Kegiatan Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (Dokumen)		1	30.000.000	Sub Kegiatan Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (Dokumen)		1	30.000.000	
	Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan Dalam Rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (Layanan)		12	100.000.000	Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan Dalam Rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (Layanan)		12	100.000.000	
	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Nelayan Kecil yang Memiliki Tanda Daftar Kapal Perikanan (%)		0,15	40.000.000	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Nelayan Kecil yang Memiliki Tanda Daftar Kapal Perikanan (%)		0,15	40.000.000	

	Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan (Rekomendasi)		10	40.000.000	Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan (Rekomendasi)		10	40.000.000	
	Kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kapal Perikanan yang Memiliki Buku Kapal Perikanan (%)		0,15	40.000.000	Kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kapal Perikanan yang Memiliki Buku Kapal Perikanan (%)		0,15	40.000.000	
	Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)		10	40.000.000	Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)		10	40.000.000	

		JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (TON)		1.337,00	2.090.000.000		JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (TON)		1.337,00	985.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				2.090.000.000		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			985.000.000	
		Persentase Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya yang diadakan (%)		9,62	1.010.000.000		Persentase Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya yang diadakan (%)		9,62	605.000.000	
		Persentase Pembudidaya yang Dilayani (%)		82,50	530.000.000		Persentase Pembudidaya yang Dilayani (%)		82,50	135.000.000	
		Persentase Pelaku Perikanan Budidaya yang Terlatih (%)		25,42	550.000.000		Persentase Pelaku Perikanan Budidaya yang Terlatih (%)		25,42	245.000.000	

	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembudidayaan Ikan yang Memiliki Izin Usaha Budidaya Perikanan (%)		19,23	50.000.000	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembudidayaan Ikan yang Memiliki Izin Usaha Budidaya Perikanan (%)		19,23	25.000.000	
	Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan (Rekomendasi)		3	50.000.000	Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing		3	25.000.000	

							dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan (Rekomendasi)				
	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase Pembudidaya Ikan yang Memiliki Sertifikat Pelatihan (%)		16,95	185.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase Pembudidaya Ikan yang Memiliki Sertifikat Pelatihan (%)		16,95	105.000.000	
		Persentase POKDAKAN yang Terbentuk (%)		5,08	80.000.000		Persentase POKDAKAN yang Terbentuk (%)		5,08	30.000.000	

		Persentase POKDAKAN yang Dibina (%)		100			Persentase POKDAKAN yang Dibina (%)		100		
		Persentase POKDAKAN yang Naik Kelas (%)		1,69			Persentase POKDAKAN yang Naik Kelas (%)		1,69		
		Persentase Pembudidaya Ikan yang Mendapatkan Bantuan Pendanaan dan Pembiayaan Usaha (%)		5,08	150.000.000		Persentase Pembudidaya Ikan yang Mendapatkan Bantuan Pendanaan dan Pembiayaan Usaha (%)		5,08	40.000.000	
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (kelompok)		1	35.000.000	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (kelompok)		1	30.000.000	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)		3	80.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan		3	30.000.000	

							(Kelompok)				
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahnya (Kelompok)		3	150.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahnya (Kelompok)		3	40.000.000	
	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)		3	150.000.000	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)		5	75.000.000	

	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Persentase Pembudidayaan Ikan yang Memiliki Tanda Daftar Pencatatan Pembudidayaan Ikan Kecil (%)		0,96	40.000.000	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Persentase Pembudidayaan Ikan yang Memiliki Tanda Daftar Pencatatan Pembudidayaan Ikan Kecil (%)		0,96	25.000.000	
	Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Daya Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Rekomendasi)		5	40.000.000	Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Daya Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Rekomendasi)		5	25.000.000	
	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Data Valid Perikanan Budidaya (Dokumen)		4	440.000.000	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Data Valid Perikanan Budidaya (Dokumen)		4	85.000.000	
		Persentase Pembudidaya Ikan yang Mendapatkan Bantuan Prasarana Perikanan Budidaya (%)		6,78	850.000.000		Persentase Pembudidaya Ikan yang Mendapatkan Bantuan Prasarana Perikanan Budidaya (%)		6,78	575.000.000	

		Persentase Pembudidaya Ikan yang Mendapatkan Bantuan Sarana Perikanan Budidaya (%)		2,84	160.000.000		Persentase Pembudidaya Ikan yang Mendapatkan Bantuan Sarana Perikanan Budidaya (%)		2,84	30.000.000	
		Persentase pembudidaya ikan yang Dibina (%)		1,69	85.000.000		Persentase pembudidaya ikan yang Dibina (%)		1,69	30.000.000	
		Persentase Pembudidaya Ikan yang Memiliki Sertifikat Pelatihan Pemanfaatan Air (%)		8,47	50.000.000		Persentase Pembudidaya Ikan yang Memiliki Sertifikat Pelatihan Pemanfaatan Air (%)		8,47	40.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)		3	250.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)		3	30.000.000	

	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)		2	850.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)		2	575.000.000	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)		1	40.000.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)		1	30.000.000	
	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)		2	160.000.000	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)		2	30.000.000	
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Orang)		80	85.000.000	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat		8	30.000.000	

							(Unit)				
	Sub Kegiatan Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Unit Usaha Pembudidaya Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan (Unit)		5	50.000.000	Sub Kegiatan Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Unit Usaha Pembudidaya Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan (Unit)		5	40.000.000	
	Sub Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan (Dokumen)		1	150.000.000	Sub Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan (Dokumen)		1	25.000.000	
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				225.000.000	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				230.000.000	

		Persentase Usaha Perikanan Tangkap yang Diawasi		100	35.000.000		Persentase Usaha Perikanan Tangkap yang Diawasi		100	35.000.000	
		Persentase Usaha Perikanan bidang Pembudidaya ikan yang Diawasi		100	190.000.000		Persentase Usaha Perikanan bidang Pembudidaya ikan yang Diawasi		100	195.000.000	
	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha Perikanan Tangkap yang Taat Aturan (%)		100	35.000.000	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha Perikanan Tangkap yang Taat Aturan (%)		100	35.000.000	
		Persentase Pelaku Usaha Perikanan Budidaya yang Taat Aturan (%)		100	190.000.000		Persentase Pelaku Usaha Perikanan Budidaya yang Taat Aturan (%)		100	195.000.000	

	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)		1	190.000.000	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan Yang Diperiksa Kepatuhan nya Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota (Pelaku Usaha)		35	195.000.000	
	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)		1	35.000.000	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota (Pelaku Usaha)		25	35.000.000	
		JUMLAH PRODUKSI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN (TON)			650.000.000		JUMLAH PRODUKSI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN (TON)		824,00	320.000.000	

	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				650.000.000	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				320.000.000	
		Persentase Sarana dan Prasarana Produksi Olahan Hasil Perikanan yang diadakan (%)		100,00	250.000.000		Persentase Sarana dan Prasarana Produksi Olahan Hasil Perikanan yang diadakan (%)		100,00	115.000.000	
		Persentase Pelayanan Terhadap Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (%)		100,00	250.000.000		Persentase Pelayanan Terhadap Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (%)		100,00	55.000.000	
		Persentase Pelaku Usaha/Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan yang Terlatih (%)		5	150.000.000		Persentase Pelaku Usaha/Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan yang Terlatih (%)		5	150.000.000	

	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Persentase Pengolah an Pemasar Hasil Perikanan yang Memiliki Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (%)		2	250.000.000	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Persentase Pengolah an Pemasar Hasil Perikanan yang Memiliki Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (%)		2	55.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko (Dokumen)		1	250.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko (Dokumen)		1	55.000.000	
	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Pengolah dan Pemasar yang Telah Mengikuti Pelatihan (%)		0,05	150.000.000	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Pengolah dan Pemasar yang Telah Mengikuti Pelatihan (%)		0,05	150.000.000	

	Sub Kegiatan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Resiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)		1	150.000.000	Sub Kegiatan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Resiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)		1	150.000.000	
	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase POKLAHSAR yang Mendapatkan Bantuan (%)			250.000.000	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase POKLAHSAR yang Mendapatkan Bantuan (%)		5	115.000.000	

	Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)		1	150.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)		1	65.000.000	
	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)		3	100.000.000	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)		2	50.000.000	
		NILAI PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH		30,00	8.366.559.400		NILAI PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH		30,00	6.803.951.700	

		HASIL EVALUASI AKIP PERANGKAT DAERAH		BB (78.80)	8.366.559.400		HASIL EVALUASI AKIP PERANGKAT DAERAH		BB (78.80)	6.803.951.700	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.366.559.400		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA			6.803.951.700	
		Nilai Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah		28,30	80.000.000		Nilai Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah		28,30	85.000.000	
		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah		10,80	45.000.000		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah		10,80	50.000.000	
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI (%)		0	4.614.559.400		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI (%)		0	4.621.490.100	

		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah		72,15	207.000.000		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah		72,15	152.500.000	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah		4,12	350.000.000		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah		4,12	355.000.000	
		Persentase BMD Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik		60,65	3.070.000.000		Persentase BMD Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik		60,65	1.539.961.600	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang Disusun Sesuai Standar (%)		100	80.000.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang Disusun Sesuai Standar (%)		100	85.000.000	
		Persentase Pelaporan Kinerja yang Disusun Sesuai Standar (%)		100	45.000.000		Persentase Pelaporan Kinerja yang Disusun Sesuai Standar (%)		100	50.000.000	

	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		8	80.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		8	85.000.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		4	45.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		4	50.000.000	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Sesuai Standar (%)		100	4.614.559.400	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Sesuai Standar (%)		100	4.621.490.100	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)		37	4.589.559.400	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)		37	4.601.490.100	

	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		12	7.500.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		12	10.000.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD (Laporan)		42	17.500.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD (Laporan)		42	10.000.000	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap (%)		100	97.000.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap (%)		100	65.000.000	
		Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian (%)		100	10.000.000		Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian (%)		100	12.500.000	

		Persentase Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (%)		10,81	100.000.000		Persentase Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (%)		10,81	75.000.000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		2	97.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		2	65.000.000	
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)		12	10.000.000	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)		12	12.500.000	
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		4	100.000.000	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		4	75.000.000	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum di Perangkat Daerah			350.000.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum di Perangkat Daerah		100	355.000.000	

	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		12	300.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		12	325.000.000	
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		12	15.000.000	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		12	12.500.000	
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		12	35.000.000	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		12	17.500.000	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penambahan aset perangkat daerah			885.000.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penambahan aset perangkat daerah		71,86	105.000.000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional yang Disediakan (Unit)		5	650.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional yang Disediakan		0	-	

						(Unit)			
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	72	85.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	72	55.000.000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	150.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	50.000.000	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah		1.210.000.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	81,78	1.134.961.600	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	985.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	925.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	125.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	84.961.600	

	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1	100.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1	125.000.000	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara			975.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara		80,00	300.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		26	150.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		26	180.000.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		38	50.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		38	45.000.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		1	750.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		1	25.000.000	

	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		1	25.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		1	50.000.000	
					15.811.559.400					9.738.201.700	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam perumusan suatu program sangat diperlukan suatu masukan atau aspirasi yang akan menjadi dasar dalam membuat suatu kebijakan. Di dalam suatu perencanaan usulan-usulan yang di sampaikan dalam suatu musyawarah memiliki nilai penting, karena usulan atau permasalahan yang di dengar merupakan kondisi riil yang terjadi di masyarakat dalam hal ini masyarakat nelayan. Pengambilan usulan-usulan yang dilakukan atas dasar musyawarah memang terdiri dari orang-orang yang memiliki berbagai keahlian/kepentingan dalam suatu Lembaga pembangunan daerah (Kabupaten/Provinsi).

Hasil musyawarah terbut kemudian di carikan titik temu, yaitu prinsip-prinsip yang menjadi dasar terciptanya efisiensi dan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat nelayan yang ada di Kabupaten Bangka. Maka Dinas Perikanan Kabupaten Bangka sebagai leading sector telah melakukan prinsip efisiensi yang tepat dengan melibatkan para pemangku kebijakan, dalam hal ini para perumus kebijakan yang terdiri dari para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kab.Bangka dengan melakukan diskusi, dengar pendapat dan penyerapan aspirasi dengan para masyarakat nelayan dalam suatu forum Musrenbang yang mana hasil musyarawah tersebut sudah sesuai dengan prioritas Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bangka tahun 2025.

Dibawah ini merupakan table hasil usulan dengar pendapat dan penyerapan aspirasi masyarakat nelayan yang tertuang dalam Musrenbang Dinas Perikanan Kabupaten Bangka tahun 2025.

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Bangka

OPD : Dinas Perikanan

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kab. Bangka	Persentase Nelayan yang Dilayani (%)		
			Persentase Pelaku Perikanan Tangkap yang Terlatih (%)		
			Persentase Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap yang diadakan (%)		
	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai,	Kab. Bangka	Persentase Nelayan/KUB yang Mendapatkan Bantuan Prasarana Perikanan Tangkap (%)		

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Data Valid Perikanan Tangkap (Dokumen)		
			Persentase Nelayan/KUB yang Mendapatkan Bantuan Sarana Perikanan Tangkap (%)		
	Sub Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kab. Bangka	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	2 Paket	Usulan Dewan
II	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Kab. Bangka	Persentase Nelayan yang Dilayani (%)		
			Persentase Pelaku Perikanan Tangkap yang Terlatih (%)		
			Persentase Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap yang diadakan (%)		
	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan ikan	Kab. Bangka	Persentase Pembudidaya Ikan yang Mendapatkan Bantuan Prasarana Perikanan Budidaya (%)		
			Persentase Pembudidaya Ikan yang Dibina (%)		
			Persentase Pembudidaya Ikan yang Memiliki Sertifikat Pelatihan Pemanfaatan Air (%)		
			Persentase Pembudidaya Ikan yang Mendapatkan Bantuan Sarana Perikanan Budidaya (%)		
			Data Valid Perikanan Budidaya (Dokumen)		
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (unit)	1 paket	Usulan Dewan

BAB III

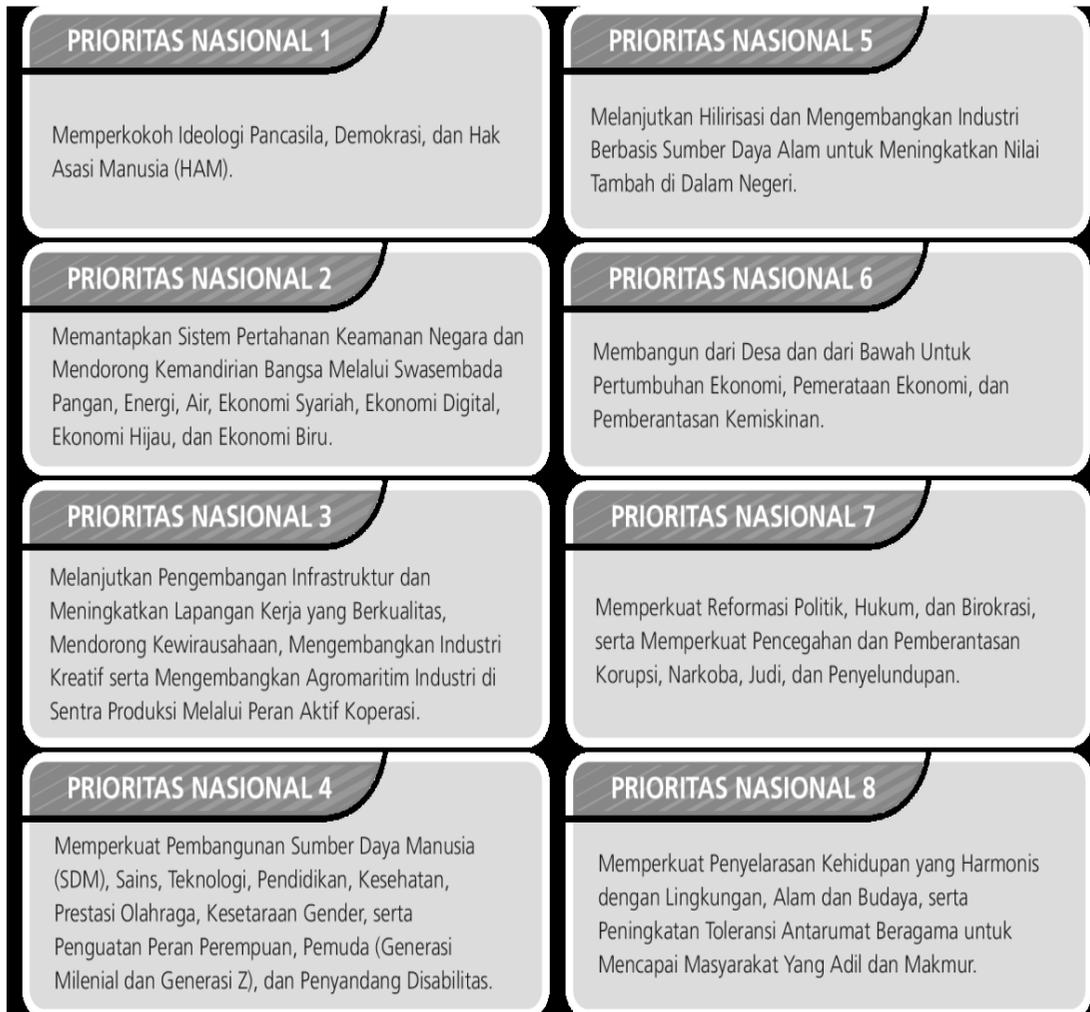
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Selama 78 tahun kemerdekaan, berbagai kemajuan telah berhasil dicapai oleh Bangsa Indonesia. Namun demikian, Indonesia masih terjebak sebagai negara berpendapatan menengah (*middle income trap*) yang diwarnai dengan kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok pendapatan. Tantangan ke depan yang perlu diantisipasi terutama pergeseran demografi, perubahan teknologi yang cepat, perubahan geopolitik dan geoekonomi, serta perubahan iklim. Untuk merespons berbagai tantangan tersebut, perlu optimalisasi modal dasar yang dimiliki, antara lain bonus demografi, modal sosial budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim. Dengan demikian cita-cita 100 tahun Indonesia merdeka atau Indonesia Emas 2045, menjadi negara nusantara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan di tahun 2045 dapat terwujud.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah. "**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**" Sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.

Gambar 3.1 Prioritas Nasional



Dari 8 (delapan) Prioritas Nasional yang di tetapkan Pemerintah dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025, maka Proritas Nasional 2 (dua) menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan Pembangunan khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dimana Ekonomi Biru menjadi salah satu aspek yang menjadi kajian dalam menentukan arah kebijakan pembangun Daerah

Arah kebijakan ekonomi biru sebagai penghela pertumbuhan ekonomi (*prime mover*) dan sumber pertumbuhan baru, maka perlu dilaksanakan melalui :

(1) menguatkan tata kelola ekosistem ekonomi biru dan diplomasi maritim, melalui antara lain penyederhanaan perizinan, fasilitasi akses pendanaan, penguatan kelembagaan pelaku usaha kelautan dan perikanan, pengembangan kawasan strategis dan pusat pertumbuhan ekonomi maritim, *blue finance* dan *good neighbor policy*; (2) meningkatkan kesehatan laut yang mencakup pengelolaan ekosistem dan kawasan konservasi perairan, penanganan sampah laut, dan rehabilitasi pesisir, melalui identifikasi dan pencadangan kawasan konservasi perairan baru di daerah,

peningkatan kapasitas kompetensi pengelola kawasan konservasi dengan jejaring dan kemitraan, pembangunan sarana prasarana pengolahan dan penanganan sampah laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penyadartahuan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil terkait dampak sampah laut, serta rehabilitasi ekosistem mangrove, terumbu karang, dan lamun; (3) mengembangkan industrialisasi perikanan yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan, mencakup antara lain peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan hilirisasi potensi sumber daya kelautan dan perikanan termasuk perikanan tangkap, perikanan budidaya, rumput laut, dan garam melalui pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya yang berdaya saing serta penguatan sistem rantai dingin dan efisiensi rantai pasok produksi; (4) menguatkan industri manufaktur berbasis kelautan, terutama industri perkapalan dan garam, antara lain melalui penguatan sarana dan prasarana industri garam, pengembangan industri galangan kapal, dan penguatan rantai pasok bahan baku industri perkapalan; (5) menguatkan sistem transportasi, logistik, dan perdagangan jalur perairan, termasuk untuk peningkatan konektivitas di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan, pulau-pulau kecil dan terluar; (6) mengembangkan destinasi pariwisata berbasis bahari dan danau serta pemanfaatan jasa kelautan berkelanjutan melalui peningkatan perkuatan sarana dan prasarana pariwisata bahari, penguatan keterampilan dan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan usaha dan investasi, memperkuat pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan, meningkatkan investasi pariwisata berkelanjutan, mengembangkan pariwisata bahari berbasis masyarakat berkelanjutan, dan memperkuat keberlanjutan dan ketahanan rantai pasok pariwisata; (7) meningkatkan kapasitas dan optimalisasi pemanfaatan iptek dan inovasi untuk peningkatan produktivitas ekonomi biru, serta peningkatan sumber daya manusia maritim, melalui perbaikan sistem pendidikan terutama terkait *science, technology, engineering, art, and mathematics*, penyusunan rencana terpadu dan fasilitasi pelaksanaan untuk pengembangan, alih teknologi dan adopsi teknologi, meningkatkan investasi untuk pendidikan dan riset berkualitas, serta penguatan faktor-faktor pendukung pembangkitan energi terbarukan dan lepas pantai, perikanan tangkap dan budi daya, rumput laut dan hilirisasinya, konservasi dan kelestarian biodiversitas kelautan, serta penguatan konektivitas maritim untuk mendukung rantai pasok nasional dan global.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan tahap yang utama dalam menentukan sebuah perencanaan strategis sehingga dalam pelaksanaannya akan terarah sesuai tujuan, sedangkan sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan sebuah perencanaan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Perikanan Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kontribusi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Sub Sektor Perikanan.
2. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Sasaran adalah hal yang ingin dicapai oleh individu, grup, atau seluruh organisasi termasuk Perangkat Daerah dalam menjalankan Pemerintahan. Sasaran sering pula disebut tujuan. Sasaran memandu manajemen membuat keputusan dan membuat kriteria untuk mengukur suatu pekerjaan dan kinerja.

Sasaran yang dimaksudkan adalah sasaran strategis Dinas Perikanan yang mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Produksi Perikanan;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

**Tabel Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan
Kabupaten Bangka Tahun 2025**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan Kontribusi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Sub Sektor Perikanan	Persentase Kontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan	7,96	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	29.055,24
				Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	2.733,81
				Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (Ton)	824,00
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	30,00	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (kategori)	BB (78,80)

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasarannya, Dinas Perikanan Kabupaten Bangka melaksanakan 5 (lima) program, 19 (Sembilan belas) kegiatan dan 50 (lima puluh) sub kegiatan berpedoman kepada Perubahan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026. Efektivitas dan efisiensi pencapaian sasaran dan tujuan perangkat daerah merupakan pertimbangan utama dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Kabupaten Bangka, yaitu:

**Tabel 3.3. Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024
Dinas Perikanan Kabupaten Bangka**

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	Sub.Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1	Sub.Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2	Sub.Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3	Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1	Sub.Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
2	Sub.Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
3	Sub.Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1	Sub.Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2	Sub.Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
3	Sub.Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1	Sub.Kegiatan Pengadaan Mebel
2	Sub.Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3	Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2	Sub.Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3	Sub.Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
4	Sub.Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
I	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1	Sub.Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
2	Sub.Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
3	Sub.Kegiatan Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
4	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
5	Sub.Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
6	Sub.Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
7	Sub.Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
II	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
1	Sub.Kegiatan Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
2	Sub.Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
III	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1	Sub.Kegiatan Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
IV	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1	Sub.Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
I	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1	Sub.Kegiatan Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing
II	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
1	Sub.Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
2	Sub.Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil

3	Sub.Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
4	Sub.Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
III	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1	Sub.Kegiatan Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
IV	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
1	Sub.Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	Sub.Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3	Sub.Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
4	Sub.Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
5	Sub.Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
6	Sub.Kegiatan Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
7	Sub.Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	
I	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
1	Sub.Kegiatan Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota
2	Sub.Kegiatan Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
I	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
1	Sub.Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko
II	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
1	Sub.Kegiatan Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko
III	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
1	Sub.Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	Sub.Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Dari Program dan Kegiatan diatas, Dinas Perikanan Kabupaten Bangka mendapat sumber pembiayaan dari APBD, DAK dan Insentif Fiskal. Pada tahun 2025 total pagu indikatif adalah sebesar Rp. 9.738.201,700, total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya telah sesuai dengan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bangka tahun 2025.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Pada Program Pengelolaan Perikanan Tangkap pada Rencana Kerja di tahun 2025 menitikberatkan pada peningkatan sarana dan prasarana bagi para nelayan, pelayanan dalam indeks kepuasan masyarakat, serta pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh nelayan dalam usaha pembentukan Kelompok Usaha Bersama bagi para nelayan.

Lokasi/wilayah dalam mendukung program dan kegiatan tersebut adalah seluruh kecamatan yang ada di kabupaten Bangka.

Dalam upaya tercapainya target dalam program Pengelolaan Perikanan Tangka baik dalam kegiatan dan sub kegiatan, serta untuk mendukung program tersebut dibutuhkan sumber pendanaan baik dari APBD maupun dari dana Pusat (DAK).

Kebutuhan dana yang dialokasikan pada Program Pengelolaan Perikanan Tangkap yang sudah direncanakan pada Renstra 2024 -2026 adalah sebesar 1.399.250.000 (Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Berikut adalah kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat pada Program Pengelolaan Perikanan Tangkap :

- Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
 - Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
- Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
- Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
 - Sub Kegiatan Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
 - Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
- Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota;
 - Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT
- Kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT

2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Pada Program Pengelolaan Perikanan Budidaya pada Rencana Kerja di tahun 2025 menitikberatkan pada peningkatan sarana dan prasarana bagi para kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN) serta melakukan pembinaan dan pemantauan kepada kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN),

Lokasi/wilayah dalam mendukung program dan kegiatan tersebut adalah kecamatan yang ada di kabupaten Bangka.

Dalam upaya tercapainya target dalam program Pengelolaan Perikanan Budidaya, baik pada kegiatan dan sub kegiatan, serta untuk mendukung program tersebut dibutuhkan sumber pendanaan baik dari APBD maupun dari dana Pusat (DAK).

Kebutuhan dana yang dialokasikan pada Program Pengelolaan Perikanan Budidaya yang sudah direncanakan pada Renstra 2024 -2026 adalah sebesar 985.000.000 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah).

Berikut adalah kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat pada Program Pengelolaan Perikanan Budidaya :

- Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;

- Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing
- Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil;
 - Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
 - Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
- Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota; dan
 - Sub Kegiatan Pelayanan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya an Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
 - Sub Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
 - Sub Kegiatan Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat

3. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pada Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Rencana Kerja di tahun 2025 menitikberatkan pada Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Budidaya di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota

Lokasi/wilayah dalam mendukung program dan kegiatan tersebut adalah kecamatan yang ada di kabupaten Bangka.

Dalam upaya tercapainya target dalam program Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan baik pada kegiatan dan sub kegiatan, serta untuk mendukung program tersebut dibutuhkan sumber pendanaan baik dari APBD maupun dari dana Pusat (DAK).

Kebutuhan dana yang dialokasikan pada Program Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang sudah direncanakan pada Renstra 2024 -2026 adalah sebesar 230.000.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

Berikut adalah kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat pada Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan :

- Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Budidaya di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota.

4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Pada Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan pada Rencana Kerja di tahun 2025 menitikberatkan pada pengurangan angka stunting di seluruh kecamatan di Kabupaten Bangka serta melakukan Pelaksanaan Bimbingan dan Penetapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

Lokasi/wilayah dalam mendukung program dan kegiatan tersebut adalah kecamatan yang ada di kabupaten Bangka.

Dalam upaya tercapainya target dalam program Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan baik pada kegiatan dan sub kegiatan, serta untuk mendukung program tersebut dibutuhkan sumber pendanaan baik dari APBD maupun dari dana Pusat (DAK).

Kebutuhan dana yang dialokasikan pada Program Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang sudah direncanakan pada Renstra 2024 -2026 adalah sebesar 320.000.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).

Berikut adalah kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat pada Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan :

- Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
 - Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota
- Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penetapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
- Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pemberian fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

- Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja (Renja) dan pendanaan perangkat Daerah berisi rumusan rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Secara keseluruhan guna melaksanakan program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Bangka pada Tahun 2023 direncanakan kebutuhan dana/pagu indikatif disajikan dalam tabel T-C.33.

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERIKANAN KAB. BANGKA
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGE T 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		DINAS PERIKANAN				9,738,201,700.00							10,125,837,500.00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				9,738,201,700.00							10,125,837,500.00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				9,738,201,700.00							10,125,837,500.00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah Nilai Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah	28,65 'Nilai 4,25' Indeks 11,05' Nilai 72,20' Indeks 0% 60,85%	Nilai 28,30 Nilai 10,80 Indeks 72,15% Indeks 4,12% 60,65%	6,803,951,700.00						28,65 'Nilai 4,25' Indeks 11,05' Nilai 72,20' Indeks 0% 60,85%	6,917,059,500.00	
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja yang Disusun Sesuai Standar Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun sesuai Standar	100% 100%	100 % 100 %	135,000,000.00			-	Pembangu nan Peme ntahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah (Laki- Laki 19, Perempuan 18)	100% 100%	145,000,000.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24 Dokumen	8 Dokumen	85,000,000.00	Kab. Bangka, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Peme ntahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah (Laki- Laki 19, Perempuan 18)	8 Dokumen	90,000,000.00	DINAS PERIKANAN

	3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	4 Laporan	50,000,000.00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah (Laki-Laki 19, Perempuan 18)	4 Laporan	55,000,000.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat daerah yang Sesuai Standar	1	1	4,621,490,100.00			-	Pembangunan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah (Laki-Laki 19, Perempuan 18)	1	4,638,559,500.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	4,601,490,100.00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah (Laki-Laki 19, Perempuan 18)	37 Orang/bulan	4,613,559,500.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	8	9.00	10	11	12	13	14	15	16.00	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 Dokumen	12 Dokumen	10,000,000.00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah (Laki-Laki 19, Perempuan 18)	12 Dokumen	12,500,000.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD												

			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	126 Laporan	42 Laporan	10,000,000.00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah (Laki-Laki 19, Perempuan 18)	42 Laporan	12,500,000.00	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian Persentase Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Persentase Pegawai yang Menggunakan Atribut Lengkap	100% 100% 10,81%	100 % 10,81 % 100 %	152,500,000.00			-	Pembangunan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah (Laki-Laki 19, Perempuan 18)	100% 100% 10,81%	109,500,000.00	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	2 Paket	65,000,000.00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah (Laki-Laki 19, Perempuan 18)	1 Paket	19,500,000.00	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	36 Dokumen	12 Dokumen	12,500,000.00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah (Laki-Laki 19, Perempuan 18)	12 Dokumen	15,000,000.00	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	4 Orang	75,000,000.00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah (Laki-Laki 19, Perempuan 18)	4 Orang	75,000,000.00	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum di Perangkat Daerah	1	1	355,000,000.00			-	Pembangunan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah (Laki-Laki 19, Perempuan 18)	1	385,000,000.00	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	8	9.00	10	11	12	13	14	15	16.00	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinas dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	12 Laporan	325,000,000.00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah (Laki-Laki 19, Perempuan 18)	12 Laporan	350,000,000.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD												
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	36 Dokumen	12 Dokumen	12,500,000.00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah (Laki-Laki 19, Perempuan 18)	12 Dokumen	15,000,000.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD												
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	36 Dokumen	12 Dokumen	17,500,000.00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah (Laki-Laki 19, Perempuan 18)	12 Dokumen	20,000,000.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penambahan Aset Perangkat Daerah	0.7186	0.7186	105,000,000.00			-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah (Laki-Laki 19, Perempuan 18)	0.7186	115,000,000.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel												
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	216 Unit	72 Unit	55,000,000.00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah (Laki-Laki 19, Perempuan 18)	82 Unit	60,000,000.00	DINAS PERIKANAN

	3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesn Lainnya yang Disediakan	15 Unit	5 Unit	50,000,000.00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah (Laki-Laki 19, Perempuan 18)	5 Unit	55,000,000.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	0.8178	0.8178	1,134,961,600.00			-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah (Laki-Laki 19, Perempuan 18)	0.8178	1,189,000,000.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	1 Laporan	925,000,000.00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah (Laki-Laki 19, Perempuan 18)	1 Laporan	950,000,000.00	DINAS PERIKANAN
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	8	9.00	10	11	12	13	14	15	16.00	17
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	1 Laporan	84,961,600.00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah (Laki-Laki 19, Perempuan 18)	1 Laporan	89,000,000.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	1 Laporan	125,000,000.00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Perangkat Daerah (Laki-Laki 19, Perempuan 18)	1 Laporan	150,000,000.00	DINAS PERIKAMAN
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara	0.8	0.8	300,000,000.00			-	Pembangunan Penguatan Kapasitas Birokrasi	BMD Lingkup Perangkat Daerah	0.8	335,000,000.00	DINAS PERIKAMAN
3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Mobil 24 Motor Unit	26 Unit	180,000,000.00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Penguatan Kapasitas Birokrasi	BMD Lingkup Perangkat Daerah	4 Mobil 22 Motor Unit	185,000,000.00	DINAS PERIKAMAN
3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	38 Unit	45,000,000.00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Penguatan Kapasitas Birokrasi	BMD Lingkup Perangkat Daerah	38 Unit	50,000,000.00	DINAS PERIKAMAN
3.25.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya													
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	25,000,000.00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Penguatan Kapasitas Birokrasi	BMD Lingkup Perangkat Daerah	1 Unit	25,000,000.00	DINAS PERIKAMAN
3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	50,000,000.00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Penguatan Kapasitas Birokrasi	BMD Lingkup Perangkat Daerah	1 Unit	75,000,000.00	DINAS PERIKAMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	8	10	11	12	13	14	15	17		
						9.00						16.00		
2.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Nelayan yang Dilayani Persentase Pelaku Perikanan Tangkap yang Terlatih Persentase Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap yang diadakan	83,00% 1,20% 24,00%	82,50 % 1,20 % 24,00 %	1,399,250,000.00					83,00% 1,20% 24,00%	1,553,778,000.00		
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Nelayan/KUB yang Mendapatkan Bantuan Prasarana Perikanan Tangkap Data Valid Perikanan Tangkap Persentase Nelayan/KUB yang Mendapatkan Bantuan Sarana Perikanan Tangkap	21,45% 3'Dokumen 2,55%	2,55 % 1 Dokumen 21,45 %	664,250,000.00			-	Pembangu nan Ekonomi Penguatan sektor-sekt or ekonomi unggulan	Kelompok Usaha Bersama (KUB)	21,45% 1'Dokumen 2,55%	763,778,000.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan												
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 Dokumen	1 Dokumen	40,000,000.00	Kab. Bangka, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Ekonomi Penguatan sektor-sekt or ekonomi unggulan	Kelompok Usaha Bersama (KUB)	1 Dokumen	45,000,000.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap												
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	3 Unit	1 Unit	399,250,000.00	Kab. Bangka, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Ekonomi Penguatan sektor-sekt or ekonomi unggulan	Kelompok Usaha Bersama (KUB)	1 Unit	468,778,000.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap												
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	6 Unit	2 Unit	225,000,000.00	Kab. Bangka, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Ekonomi Penguatan sektor-sekt or ekonomi unggulan	Kelompok Usaha Bersama (KUB)	2 Unit	250,000,000.00	DINAS PERIKANAN

	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Nelayan/KUB yang Mendapatkan Bantuan Pendanaan/Pembiayaan, Kemitraan Usaha Persentase Nelayan yang Memiliki Sertifikat Pelatihan Persentase KUB yang Dibina Persentase KUB yang Terbentuk	100% 0,03% 1,20% 0,77%	0,03 % 1,20 % 100 % 0,77 %	525,000,000.00			-	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sekt or ekonomi unggulan	Kelompok Usaha Bersama (KUB)	100% 0,03% 1,20% 0,77%	560,000,000.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil												
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	8	9.00	10	11	12	13	14	15	16.00	17
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	150 Orang	50 Orang	325,000,000.00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sekt or ekonomi unggulan	Kelompok Usaha Bersama (KUB)	50 Orang	350,000,000.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil												
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	9 Kelompok	3 Kelompok	75,000,000.00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sekt or ekonomi unggulan	Kelompok Usaha Bersama (KUB)	3 Kelompok	80,000,000.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha												
			Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	15 Unit Usaha	5 Unit Usaha	125,000,000.00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sekt or ekonomi unggulan	Kelompok Usaha Bersama (KUB)	5 Unit Usaha	130,000,000.00	DINAS PERIKANAN

	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase Pelaku Usaha Perikanan Tangkap yang Terlayani	1	1	130,000,000.00			-	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor unggulan	Pelaku Usaha Perikanan Tangkap	1	140,000,000.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.03.0001	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)												
			Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000.00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor unggulan	Pelaku Usaha Perikanan Tangkap	1 Dokumen	35,000,000.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)												
			Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	36 Layanan	12 Layanan	100,000,000.00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor unggulan	Pelaku Usaha Perikanan Tangkap	12 Layanan	105,000,000.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Nelayan Kecil yang Memiliki Tanda Daftar Kapal Perikanan	0.0015	0.0015	40,000,000.00			-	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor unggulan	Nelayan Kecil	0.0015	45,000,000.00	DINAS PERIKANAN
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	8	9.00	10	11	12	13	14	15	16.00	17
	3.25.03.2.04.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT												
			Jumlah Rekomendas Tanda Daftar Kapal Perikanan	30 Rekomendasi	10 Rekomendasi	40,000,000.00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor unggulan	Nelayan Kecil	10 Rekomendasi	45,000,000.00	DINAS PERIKANAN

	3.25.03.2.06	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kapal Perikanan yang Memiliki Buku Kapal Perikanan	0.0015	0.0015	40,000,000.00			-	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Nelayan Kecil	0.0015	45,000,000.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.06.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT												
			Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Dokumen	10 Dokumen	40,000,000.00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Nelayan Kecil	10 Dokumen	45,000,000.00	DINAS PERIKANAN
3.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Pelaku Perikanan Budidaya yang Terlatih Persentase Pembudidaya Ikan yang Dilayani Persentase Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya yang diadakan	83,00% 25,42% 9,62%	25,42 % 82,50 % 9,62 %	985,000,000.00						83,00% 25,42% 9,62%	1,060,000,000.00	
	3.25.04.2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembudidayaan Ikan yang Memiliki Izin Usaha Budidaya Perikanan	0.1923	0.1923	25,000,000.00			-	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Pembudidaya Ikan	0.1923	30,000,000.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.01.0002	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing												
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing	9 Rekomendasi	3 Rekomendasi	25,000,000.00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Pembudidaya Ikan	3 Rekomendasi	30,000,000.00	DINAS PERIKANAN

dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
									NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	8	9.00	10	11	12	13	14	15	16.00	17	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase POKDAKAN yang Dibina Persentase Pembudidaya Ikan yang Memiliki Sertifikat Pelatihan Persentase Pembudidaya Ikan yang Mendapatkan Bantuan Pendanaan dan Pembiayaan Usaha Persentase POKDAKAN yang Naik Kelas Persentase POKDAKAN yang Terbentuk	5,08% 16,95% 1,69% 5,08% 100%	100 % 16,95 % 5,08 % 1,69 % 5,08 %	175,000,000.00			-	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Pembudidaya Ikan	5,08% 16,95% 1,69% 5,08% 100%	195,000,000.00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil													
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	3 Kelompok	1 Kelompok	30,000,000.00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Pembudidaya Ikan	1 Kelompok	35,000,000.00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil													
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	9 Kelompok	3 Kelompok	30,000,000.00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Pembudidaya Ikan	3 Kelompok	35,000,000.00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.04.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha													

			Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	9 Kelompok	3 Kelompok	40,000,000.00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Pembudidayaan Ikan	3 Kelompok	45,000,000.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan												
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	15 Kelompok	5 Kelompok	75,000,000.00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Pembudidayaan Ikan	5 Kelompok	80,000,000.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembudidayaan Ikan yang Memiliki Tanda Daftar Pencatatan Pembudidayaan Ikan Kecil	0.0096	0.0096	25,000,000.00			-	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Pembudidayaan Ikan	0.0096	25,000,000.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.03.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota												
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	8	9.00	10	11	12	13	14	15	16.00	17
			Jumlah Rekomendas Perzinan Berusaha bagi Pembudi Daya Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Rekomendasi	5 Rekomendasi	25,000,000.00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Pembudidayaan Ikan	5 Rekomendasi	25,000,000.00	DINAS PERIKANAN

3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Pembudidaya Ikan yang Mendapatkan Bantuan Prasarana Perikanan Budidaya (%) Persentase Pembudidaya Ikan yang Dibina Persentase Pembudidaya Ikan yang Memiliki Sertifikat Pelatihan Pemanfaatan Air Persentase Pembudidaya Ikan yang Mendapatkan Bantuan Sarana Perikanan Budidaya Data Valid Perikanan Budidaya	2.84% 8,47% 6.78% 1,69% 12'Dokumen	6.78 % 1,69 % 8,47 % 2.84 % 4 Dokumen	760,000,000.00			-	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sekt or ekonomi unggulan	Pembudidaya Ikan	2.84% 8,47% 6.78% 1,69% 4'Dokumen	810,000,000.00	DINAS PERIKANAN
3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota												
		Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9 Dokumen	3 Dokumen	30,000,000.00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sekt or ekonomi unggulan	Pembudidaya Ikan	3 Dokumen	35,000,000.00	DINAS PERIKANAN
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota												
		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	2 Unit	575,000,000.00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sekt or ekonomi unggulan	Pembudidaya Ikan	2 Unit	600,000,000.00	DINAS PERIKANAN
3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota												
		Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	3 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000.00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sekt or ekonomi unggulan	Pembudidaya Ikan	1 Dokumen	35,000,000.00	DINAS PERIKANAN
3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota												
		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Unit	2 Unit	30,000,000.00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sekt or ekonomi unggulan	Pembudidaya Ikan	2 Unit	35,000,000.00	DINAS PERIKANAN
3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	8	10	11	12	13	14	15	17		
			Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	24 Unit	8 Unit	9.00 30,000,000.00	Kab. Bangka, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Ekonomi Penguatan sektor-sekt or ekonomi unggulan	Pembudidaya Ikan	8 Unit	16.00 35,000,000.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0011	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat												
			Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	15 Unit	5 Unit	40,000,000.00	Kab. Bangka, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Ekonomi Penguatan sektor-sekt or ekonomi unggulan	Pembudidaya Ikan	5 Unit	45,000,000.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat												
			Jumah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	3 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000.00	Kab. Bangka, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Ekonomi Penguatan sektor-sekt or ekonomi unggulan	Pembudidaya Ikan	1 Dokumen	25,000,000.00	DINAS PERIKANAN
4.	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Usaha Perikanan Bidang Pembudidaya Ikan yang Diawasi Persentase Usaha Perikanan Tangkap yang Diawasi	100% 100%	100 % 100 %	230,000,000.00						100% 100%	235,000,000.00	
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Dusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha Perikanan Budidaya yang Taat Aturan Persentase Pelaku Usaha Perikanan Tangkap yang Taat Aturan	100% 100%	100 % 100 %	230,000,000.00			-	Pembangu nan Ekonomi Penguatan sektor-sekt or ekonomi unggulan	Pelaku Usaha Perikanan Tangkap dan Budidaya	100% 100%	235,000,000.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota												

			Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	35 Pelaku Usaha	35 Pelaku Usaha	195,000,000.00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Pelaku Usaha Perikanan Tangkap dan Budidaya	35 Pelaku Usaha	200,000,000.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota												
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	25 Pelaku Usaha	25 Pelaku Usaha	35,000,000.00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Pelaku Usaha Perikanan Tangkap dan Budidaya	25 Pelaku Usaha	35,000,000.00	DINAS PERIKANAN
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	8	9.00	10	11	12	13	14	15	16.00	17
5.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Pelaku Usaha/Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan yang Terlatih Persentase Pelayanan Terhadap Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Persentase Sarana dan Prasarana Produksi Olahan Hasil Perikanan yang diadakan	100% 100% 15%	5 % 100 % 100 %	320,000,000.00						100% 100% 5%	360,000,000.00	
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Persentase Pengolahan Pemasar Hasil Perikanan yang Memiliki Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	0.06	0.02	55,000,000.00			-	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	0.02	60,000,000.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko												
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	3 Dokumen	1 Dokumen	55,000,000.00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	1 Dokumen	60,000,000.00	DINAS PERIKANAN

		Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	6 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	50,000,000.00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan	Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	2 Pelaku Usaha	55,000,000.00	DINAS PERIKANAN
J U M L A H					9,738,201,700.00							10,125,837,500.00	

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting yang Perlu Diperhatikan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Bangka tahun anggaran 2025 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan. Penyerapan anggaran kegiatan APBD Kabupaten Bangka tahun anggaran 2025.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Tipe A Kabupaten Bangka, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Perikanan dan Tugas Pembantuan yang diberikan/didelegasikan kepada Daerah.

Dinas Perikanan Kabupaten Bangka menetapkan beberapa indikator kinerja utama, Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan adalah :

1. Meningkatnya Produksi Perikanan
2. Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perikanan

Keberhasilan pencapaian indikator sasaran tidak terlepas dari kerja sumber daya aparatur pemerintah yang mempunyai kompetensi, profesionalitas dan inovatif, didukung sarana prasarana yang memadai serta dukungan berbagai pihak. Kegagalan selama pelaksanaan kerja tahun 2023 akan menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan kerja kedepan sesuai Rencana Strategis 2024-2026.

Dalam rangka pemantapan dan peningkatan pelaksanaan tugas kedepan untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Bangka, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada semua aparatur dalam lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Bangka dan masyarakat untuk dapat memberikan masukan yang konstruktif.
2. Secara aktif mengangkat dan mendiskusikan isu aktual yang berkembang di masyarakat yang masih perlu dicari solusinya.
3. Mengikuti tahapan-tahapan baik perencanaan, waktu pelaksanaan.

Dengan memperhatikan tiga hal diatas diharapkan Perikanan Kabupaten Bangka dapat memenuhi target kinerja dan semakin dirasakan keberadannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang ideal/optimal.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pemerintah daerah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan antara lain :

- a. Setiap bidang disarankan untuk menyusun program dan kegiatan yang akan di laksanakan dengan cermat yang mengacu pada RPD Kab. Bangka dan RENSTRA Dinas Perikanan Tahun 2024-2026.
- b. Akan tetap mengusulkan kembali kegiatan yang tidak terlaksana pada anggaran 2022 dan mengevaluasi kembali program serta kegiatan yang akan di usulkan.
- c. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitra usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan kepada para Nelayan, Kelompok Pembudidaya Ikan serta para pelaku usaha pengolah dan pemasar.
- d. Meningkatkan Produksi Perikanan dengan cara peningkatan sarana dan prasarana Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolah dan Pemasar serta Pengawasan Sumber Daya Perikanan.

Sungailiat, Februari 2024

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Bangka,



Drs. Arman
Pembina Utama Muda
NIP. 19681028 199601 1 001

LAMPIRAN



BUPATI BANGKA

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 100.3.3.2/ 1376 /BAPPEDA/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dengan Keputusan Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
23. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22 Seri D);
24. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Tugas secara umum :
 - a. mengambil langkah-langkah yang tepat dan diperlukan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025;
 - b. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mendukung penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025; dan
 - c. menyusun dan menyajikan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, mulai dari Rancangan Awal, Rancangan, Rancangan Akhir sampai pada Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Tugas berdasarkan kedudukan dalam Tim :
 - a. penanggung Jawab bertugas memastikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka tepat waktu dan sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. ketua bertugas mengatur dan memimpin seluruh anggota tim dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka; dan
 - c. sekretaris bertugas melakukan pemeriksaan dan menyiapkan kelengkapan bahan dan seluruh administrasi untuk kelancaran penyusunan dan penulisan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka; dan
 - d. anggota bertugas menghimpun, mengolah, mengonsep, menyusun, dan menulis serta menyetik naskah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati Bangka.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, Penanggung Jawab Tim dapat menetapkan pembagian tugas yang lebih rinci kepada seluruh anggota tim.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 8 Desember 2023

Pj. BUPATI BANGKA,

M. HARIS AR



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
 NOMOR : 100.3.3.2/1376/BAPPEDA/2023
 TANGGAL : 8 DESEMBER 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

I. SEKRETARIAT DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka	Penanggung Jawab
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka	Ketua
3.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka	Sekretaris
4.	Pranata Komputer Terampil pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka/Dwi Afriyanti, A.Md	Anggota
5.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan /Sugianto, SE	Anggota
6.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Adm.Perekonomian/ Nurleily, S.A.P.	Anggota
7.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa/Adi Warman, SE.	Anggota
8.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Adm.Kesra dan Kemasyarakatan/ Marisa, S.I.P.	Anggota
9.	Analisis SDMA pada Bagian Umum dan Rumah Tangga/ Syaipudin, S.I.P.	Anggota
10.	Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Keprotokolan/ Elisnawati, S.AP	Anggota
11.	Perencana Ahli Muda pada Bagian Perencanaan dan Keuangan/ Ahmad Syahrudin, S.I.P.	Anggota
12.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum dan HAM/ Hivia Sari Dewi, S.H.	Anggota
13.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi/Fadya Nafaila, SH	Anggota

II. SEKRETARIAT DPRD

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris DPRD	Penanggung Jawab
2.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Sekretariat DPRD	Sekretaris
4.	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	Anggota
5.	Kepala Bagian Umum	Anggota
6.	Peleaksana pada Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota

III. INSPEKTORAT

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Inspektur	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Insepktorat	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Inspektorat Kabupaten Bangka	Sekretaris
4.	Irban Bidang Pemerintahan	Anggota
5.	Irban Bidang Investigasi	Anggota
6.	Irban Bidang Ekonomi dan Keuangan	Anggota
7.	Irban Bidang Pembangunan	Anggota
8.	Irban Bidang Aparatur dan Kesra	Anggota
9.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Inspektorat	Anggota

IV. BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah	Anggota
5.	Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah	Anggota
6.	Kepala Bidang Anggaran Daerah	Anggota
7.	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah	Anggota
8.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
9.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah	Anggota
10.	Pelaksana pada Sekeratiat Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota

V. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Mutasi Kepegawaian	Anggota
5.	Kepala Bidang Sistem Informasi Kepegawaian	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM	Anggota
7.	Analisis Perencanaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Anggota
8.	Pengadministrasi Surat Menyurat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Anggota

VI. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua
3.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	Anggota
5.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Anggota
NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
6.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Anggota
7.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

VII. DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olahraga	Penanggung Jawab
2.	Sekeratris Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olahraga	Ketua
3.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas	Anggota
6.	Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga	Anggota
7.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekeratriat Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olahraga	Anggota

VIII. DINAS KESEHATAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Plt. Kepala Dinas Kesehatan	Penanggung Jawab
2.	Sekeratris Dinas Kesehatan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Kesehatan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Anggota
6.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Anggota
7.	Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Kesehatan	Anggota
9.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Kesehatan	Anggota
10.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Kesehatan	Anggota

IX. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Bina Marga	Anggota
5.	Kepala Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi	Anggota
6.	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Anggota
7.	Kepala Bidang Tata Ruang	Anggota
8.	Perencana Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
9.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota

X. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Sekretaris
4.	Kapala Bidang Perumahan	Anggota
5.	Kapala Bidang Permukiman	Anggota
6.	Kapala Bidang Pertanahan	Anggota
7.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota

XI. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
4.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	Anggota
5.	Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Personil	Anggota
7.	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran	Anggota
NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
8.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
10.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
11.	Pelaksana pada Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
12.	Pelaksana pada Bagian Keuangan	Anggota

XII. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ketua
3.	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik	Anggota
5.	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota
6.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota

XIII. DINAS SOSIAL

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Sosial	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Sosial	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Sosial	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Anggota
6.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Anggota
7.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Sosial	Anggota

XIV. DINAS TENAGA KERJA, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perdagangan dan Perindustrian	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Perdagangan dan Perindustrian	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja, Perdagangan dan Perindustrian	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Anggota
5.	Kepala Bidang Hubungan Industrial	Anggota
6.	Kepala Bidang Perindustrian	Anggota
7.	Kepala Bidang Perdagangan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Tenaga Kerja, Perdagangan dan Perindustrian	Anggota

XV. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk	Anggota
5.	Kepala Bidang Pembinaan Keluarga Berencana Ketahanan, Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Anggota
6.	Kepala Bidang Perlindungan Anak	Anggota
7.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota

XVI. DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pangan dan Pertanian	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pangan dan Pertanian	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pangan dan Pertanian	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
5.	Kepala Bidang Perkebunan	Anggota
6.	Kepala Bidang Prasarana Sarana Penyuluhan	Anggota
7.	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
8.	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
9.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Anggota
10.	Pengadministrasian Perencanaan dan Program	Anggota

XVII. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	Ketua
3.	Perencana pada Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Penataan Lingkungan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Anggota
7.	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	Anggota

XVIII. DINAS PERHUBUNGAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perhubungan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Perhubungan	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Anggota
5.	Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
7.	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	Anggota

XIX. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
5.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
7.	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota

8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
----	--	---------

XX. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi	Anggota
5.	Kepala Bidang Fasilitasi Keuangan dan Aset Desa	Anggota
6.	Kepala Bidang Fasilitasi Administrasi Pemerintah Desa	Anggota
7.	Penggerak Swadaya Masyarakat	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota

XXI. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi	Anggota
5.	Kepala Bidang Fasilitasi Keuangan dan Aset Desa	Anggota
6.	Kepala Bidang Fasilitasi Administrasi Pemerintah Desa	Anggota
7.	Penggerak Swadaya Masyarakat	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota

XXII. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Anggota
5.	Kepala Bidang E-Government	Anggota
6.	Kepala Bidang Persandian	Anggota
7.	Kepala Bidang Statistik	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekeratriat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota

XXIII. DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN, KOPERASI DAN UKM

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Penanaman Modal	Anggota
NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
5.	Kepala Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Anggota
6.	Kepala Bidang Pelayanan	Anggota
7.	Kepala Bidang Data dan Informasi	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM	Anggota

XXIV. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Arsip	Anggota
5.	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Anggota
6.	Kepala Bidang Layanan dan Pengembangan Perpustakaan	Anggota
7.	Arsiparis pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota
8.	Pustakawan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota
9.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota

XXV. DINAS PERIKANAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perikanan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Perikanan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Perikanan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Anggota
5.	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengolah dan Pemasaran	Anggota
7.	Kepala Bidang Pengawasan Hasil Perikanan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan / Mirzaban, S.Pi	Anggota
9.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan / Ayu Annisa Fitri, S.Tr.Pi	Anggota
10.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan / Achmad Maulana	Anggota

XXVI. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Ketua
3.	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata	Anggota
5.	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya	Anggota
6.	Kepala Bidang Kebudayaan	Anggota
7.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota

XXVII. KECAMATAN SUNGAILIAT

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Sungailiat	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Sungailiat	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXVIII. KECAMATAN PEMALI

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Pemali	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Pemali	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXIX. KECAMATAN MERAWANG

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Merawang	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Merawang	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXX. KECAMATAN PUDING BESAR

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Puding Besar	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Puding Besar	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota

9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXXI. KECAMATAN BAKAM

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Bakam	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Bakam	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXXII. KECAMATAN MENDO BARAT

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Mendo Barat	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Mendo Barat	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXXIII. KECAMATAN RIAU SILIP

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Riau Silip	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Riau Silip	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXXIV. KECAMATAN BELINYU

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Belinyu	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Belinyu	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 8 Desember 2023

Pj. BUPATI BANGKA,

M. HARIS AR



Formulir E.70

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Bangka

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.	√			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	√			
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.	√			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan.	√			

**JADWAL TENTATIF TAHAPAN PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**

NO	TAHAPAN	WAKTU	KETERANGAN	PELAKSANA
1	SK Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja PD Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka	Minggu 1 Desember 2023		Bappeda, Seluruh PD, Bagian Hukum dan HAM Setda
2	Penyusunan Rancangan Awal Renja PD Tahun 2025	Minggu 1 Desember 2023 - Minggu 1 Februari 2024	Dimulai paling lambat minggu pertama Desember tahun 2023	Seluruh PD
3	Penyampaian Rancangan Awal Renja PD kepada Bappeda	1 Februari 2024		Seluruh PD
4	Musrenbang Tk. Desa/ Kel	10-31 Januari 2024		Dinpemdes, Desa/Kelurahan
5	Musrenbang RKPd Tk. Kecamatan	5-8 Februari 2024	Paling lambat minggu kedua Februari 2024	Bappeda, Kecamatan, PD terkait
6	SE Kepala Daerah tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja PD Tahun 2025	12 Februari 2024	Paling lambat minggu kedua bulan Februari 2024	Bappeda
7	Penyempurnaan Ranwal Renja PD sesuai SE Bupati	12 Februari-11 Maret 2024		Seluruh PD
8	Forum Perangkat Daerah (dilaksanakan oleh PD berkoordinasi dengan Bappeda)	4-6 Maret 2024	Paling lambat 2 (dua) minggu setelah SE Bupati diterima	Bappeda
9	Verifikasi Draft Rancangan Renja Perangkat Daerah oleh Bappeda dan Perbaikan oleh Perangkat Daerah	1-18 Maret 2024		Bappeda dan Seluruh PD
10	Musrenbang RKPd Tingkat Kabupaten	18-21 Maret 2024		Seluruh PD
11	Penetapan RKPd Kab. Bangka melalui Perbup	2 Juli 2024	Paling lambat 1 minggu setelah penetapan RKPd Provinsi	Bappeda, Bagian Hukum dan HAM Setda
12	Surat Sekda tentang penyempurnaan Ranhir Renja PD	3 Juli 2024		Bappeda
13	Penyampaian Ranhir Renja PD kepada Bappeda	3-11 Juli 2024	Paling lambat 1 minggu setelah Perbup RKPd	Seluruh PD
14	Verifikasi Ranhir Renja PD oleh Bappeda dan Perbaikan oleh PD	15-26 Juli 2024	Paling lambat 2 minggu setelah penyampaian oleh PD	Bappeda dan Seluruh PD
15	Penyusunan Rancangan Perbup tentang Renja PD	26-29 Juli 2024		Bappeda
16	Penetapan Renja PD melalui Perbup	30 Juli 2024	Paling lambat 1 bulan setelah penetapan Perbup RKPd	Bappeda, Bagian Hukum dan HAM Setda